

Pengelolaan Keuangan Daerah Buruk

Bengkayang, BERKAT.

Ketua lintas organisasi pengawas pembangunan kabupaten Bengkayang, Irawan, Ssos, Msi mengatakan, berdasarkan LHP (BPK-RI) APBD kabupaten Bengkayang tahun 2009 memberikan opini disclaimer, hal ini semestinya menjadi perhatian serius bagi kepala daerah untuk memberikan penyegaran bagi SKPD pengelolaan keuangan dan aset daerah hal ini tentunya untuk membantu memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah beranjak dari predikat disclaimer ungkap Irawan kepada BERKAT kemarin.

Irawan meminta pengambil kebijakan daerah ini bukan hanya mengganti SKPD pengelolaan keuangan dan aset daerah namun seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah kabupaten Bengkayang yang terindikasi penyumbang temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

"Diketahui beberapa tahun berturut-turut selalu menjadi temuan BPK, jelas kinerja kepala SKPD-nya perlu dipertanyakan dan harus diganti, jangan lagi dipertahankan," jelas Irawan yang gemar menyuarakan perubahan Bengkayang ini.

"Meskipun terjadi pergeseran SKPD di lingkungan pemda baru-baru Irawan meyakini belum tentu dapat memberikan pengaruh perbaikan, sepanjang pengelolaan keuangan daerah ini masih dipegang orang lama untuk itu jelas Irawan pengambil kebijakan daerah ini mengganti kepala SKPD-nya karena ini demi kepentingan masyarakat dan kelangsungan hasil pemekaran otonomi daerah Bengkayang tegas," Irawan.

Lebih jauh Irawan mengatakan, ada dua

masalah utama yang menyebabkan pelaporan keuangan daerah masih buruk. Masalah pertama, sumber daya manusia yang menangani pengelolaan keuangan daerah di sebagian besar pemerintahan daerah tidak ditangani oleh tenaga profesional. Masalah kedua, pencatatan aset daerah masih kurang diperhatikan pemerintah daerah.

"Padahal salah satu penyebab rusaknya neraca daerah adalah akibat aset-aset yang tak dicatat dengan baik," ucapnya.

Irawan memaparkan berdasarkan catatan, BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar dimana Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang TA 2009 mendapat opini Disclaimer (Tidak Menyatakan Pendapat). Laporan Keuangan tidak dapat diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan dan pemeriksaan tidak dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Selain itu, ditemukan dalam pelaksanaan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang mengakibatkan tingkat keandalan informasi dalam laporan keuangan menjadi rendah antara lain; saldo persediaan per 31 Desember 2009 sebesar Rp4.866.388.453,00 belum disajikan sesuai dengan hasil stock opname seperti yang dipersyaratkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); saldo awal Aset Tetap pada Neraca Pemerintah Kabupaten Bengkayang per 31 Desember 2009 tidak sama dengan saldo akhir aset tetap per 31 Desember 2008; aset tetap tanah senilai Rp68.849.018.268,00 belum dapat diyakini kewajarannya dan tanah

BERKAT
BERITAKHATULISTIWA

Rabu, 23 Maret 2011

milik pemda Bengkayang belum minimal seluas 3.007.554 m² belum bersertifikat; terdapat penghapusan kendaraan senilai Rp355.000.000,00 yang belum disajikan sebagai pengurang nilai akun aset tetap peralatan dan mesin, pengadaan meubelair sebesar Rp1.521.676.000,00 pada Dinas Pendidikan diklasifikasikan tidak tepat menjadi gedung dan bangunan serta aset peralatan dan mesin pada Dinas Pertanian minimal sebesar Rp841.612.500,00 tidak tercatat dalam neraca; aset jalan, irigasi dan jaringan minimal senilai Rp3.862.948.000,00 pada Dinas Pertanian belum dicatat; penyajian SiLPA TA 2009 sebesar Rp84.020.328.247,38

tidak andal; belanja jasa konsultasi senilai Rp2.120.443.271,73 tidak sesuai ketentuan dan diantaranya sebesar Rp149.297.500,00 tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai; pembayaran ganti rugi pengadaan TA 2009 tidak didukung bukti yang memadai senilai Rp6.434.118.000,00 dan terdapat pemotongan dana senilai Rp350.796.000,00 serta terdapat transaksi untuk kepentingan pribadi senilai Rp167.500.000,00; penggunaan dana Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Dinas Pendidikan sebesar Rp1.689.500.897,00 belum dipertanggungjawabkan secara memadai. (tni)